

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Putusan Hakim PTUN Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kepala Daerah. Pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat? 2) Mengapa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima? Tujuan yang ingin penulis kaji Adalah 1) untuk mengetahui alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat, 2) untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kepala Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat karena Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Daerah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2) Alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena PTUN salah menerapkan hukum yaitu tidak ada Upaya administrasi berupa banding administrasi. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu: 1) kepada subjek hukum orang atau badan hukum perdata agar dalam menjalankan kegiatan usaha terutama dalam bidang pertambangan dapat melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku sehingga tidak berpotensi terjadinya pelanggaran, 2) kepada badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Pencabutan Izin, Putusan Hakim

ABSTRACT

Description of the State Administrative Court Judge Decision Regarding the Revocation of a Mining Business License by a Regional Head The main problems of research are 1) Why did the State Administrative Court grant the plaintiff's claim? 2) Why did the High State Administrative Court and the Supreme Court declare the claim inadmissible? The objectives the author wishes to examine are 1) to determine the reasons why the State Administrative Court granted the plaintiff's claim, 2) to determine the reasons why the High State Administrative Court and the Supreme Court declared the claim inadmissible. The research is descriptive. This type of research uses a normative research type. The independent variables in this study are: the State Administrative Court's reasons for granting the plaintiff's claim and the High State Administrative Court and Supreme Court's reasons for declaring the claim inadmissible. The dependent variable is a variable that depends on the court's decision. The dependent variable in this study is: the State Administrative Court Judge's decision related to the Revocation of a Mining Business License by a Regional Head.

The research results showing up that : 1) the reason the State Administrative Court granted the plaintiff's claim is that the issuance of the State Administrative Decision by the Regional Head conflicted with the laws and regulations and the general principles of good governance. 2) The reasons the High State Administrative Court and the Supreme Court declared the claim inadmissible because the Administrative Court misapplied the law; specifically, the plaintiff failed to exhaust administrative remedies in the form of an administrative appeal. Suggestions that can be given by the author are: 1) For legal subjects, individuals, or civil legal entities so that in carrying out business activities, especially in the mining sector, they can carry out and fulfill obligations in accordance with applicable legal regulations so that potential violations do not occur, 2) For state administrative bodies or officials in issuing state administrative decisions, they can prioritize the basis of statutory provisions and the general principles of good governance.

Keywords: Revocation License, Judge's Decision